

## **PENGEMBANGAN POLA KEMITRAAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI JAWA TIMUR**

Siswoyo Hari Santosa, Dewi Prihatini, Agung Purwanto, Aisah Jumiati, Djoko  
Susilo

Universitas Jember

Email: siswoyohari68@gmail.com

### **Abstrak**

Untuk mengembangkan dan memperkuat sektor usaha kecil, salah satu strategi yang penting adalah kemitraan dengan sektor usaha menengah dan besar melalui pola kemitraan yang didasarkan pada prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Secara umum penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pola kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat miskin di Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: (a) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat; (b) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; (c) Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa; dan (d) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; Berdasarkan hasil tersebut direkomendasikan bahwa model kemitraan dilihat dari sudut pandang sistem paling tidak, ada 3 tipe yang cocok untuk diterapkan dalam Program Pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jawa Timur, yaitu: Vertical Backward Linkage, Vertical Forward Linkage dan Horizontal Linkage.

**Kata-kata Kunci: Kemitraan, Pemberdayaan**

### **Abstract**

To develop and strengthen the small business sector, one important strategy is partnering with medium and large business sector through a partnership that is based on the principle of mutual need, mutually reinforcing and mutually beneficial. In general, this study aimed to analyze the effectiveness of a partnership for the empowerment of the poor in East Java. Based on the research, programs and activities that have been implemented are as follows: (a) Program for Community Empowerment; (B) Development Program Rural Economic Institute; (C) Community Participation Program In Village Building; and (d) Capacity Building Program Apparatus village government; Based on these results is the recommended that the partnership model from the perspective of the system at least, there are 3 types suitable to be applied in the community empowerment program in East Java province, namely: Vertical Linkage Backward, Forward Vertical and Horizontal Linkage Linkage.

**Keywords: Empowerment, Partnership**

## **PENDAHULUAN**

Keberadaan dan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, terutama dalam mengerakkan sektor rill merupakan realitas dalam kegiatan ekonomi nasional yang sangat penting dan strategis. Hal ini terbukti oleh penguatan terhadap ekonomi skala kecil dan menengah di pandang menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan untuk menopang ekonomi nasional yang kuat, dan terciptanya *fundamental* ekonomi yang tangguh. Khusus terkait dengan pola kemitraan,

khususnya antara usaha kecil masyarakat miskin, mikro dan sektor informal dengan sektor usaha besar, Pemerintah juga sudah menggulirkan kebijakan yang mewajibkan BUMN mengalokasikan 1 sampai dengan 5% keuntungan bersihnya untuk pembinaan UMKM, serta dukungan perusahaan-perusahaan swasta yang besar untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan bersihnya guna pengembangan UMKM yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun, program kemitraan yang diinisiasi pemerintah selama ini belum berhasil menaikkan margin usaha kecil, mikro dan sektor informal, karena selama ini baik BUMN maupun perusahaan-perusahaan swasta yang besar melakukan program kemitraan hanya sekedar mengikuti anjuran pemerintah, padahal yang terpenting dari program kemitraan itu adalah membuat integrasi dan sinergitas antara usaha kecil dan besar sehingga proses penambahan nilai (*value added*) terjadi dan terjadi pula saling mendukung dan saling menguntungkan antara sektor UMKM dan perusahaan besar.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah, meski sektor usaha kecil memiliki peran strategis untuk menanggulangi kemiskinan, namun sektor ini juga dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti permodalan, kemampuan manajemen usaha, kualitas sumber daya manusia pengelolanya, akses terhadap sumber daya produktif seperti modal dan teknologi, yang bermuara kepada terbatasnya kemampuan sektor usaha ini untuk berkembang. Untuk mengembangkan dan memperkuat sektor usaha kecil, salah satu strategi yang penting adalah kemitraan dengan sektor usaha menengah dan besar melalui pola kemitraan yang didasarkan pada prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Secara umum penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pola kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat miskin di Jawa Timur. Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (a) mengidentifikasi pola kemitraan antara usaha kecil masyarakat miskin dan sektor usaha menengah dan besar di Jawa Timur, dan (b) menganalisis efektivitas pola kemitraan antara usaha kecil masyarakat miskin dan sektor usaha menengah dan besar di Jawa Timur.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analitik. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode analitik digunakan untuk menerapkan berbagai analisis yang berkaitan dengan penelitian dengan jalan menyimpulkan dan menyusun data terlebih dahulu, kemudian dianalisis dan dijelaskan (Nazir, 2005).

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat langsung dari responden yang terpilih sebagai sampel. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai literatur maupun

instansi terkait yang mendukung penelitian ini. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2005-2013.

Pada dasarnya instrumen pengumpul data penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Dalam proses kerja pengumpulan data itu, ada 5 (lima) metode utama yang dapat digunakan secara simultan, yaitu:

1. Observasi partisipatif (*participant observation*) : digunakan untuk menggali data atau informasi dari sumber informasi yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, benda, dan rekaman gambar.
2. Wawancara mendalam (*In-depth interview*). Yaitu wawancara dengan informan kunci (*key informant*) untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan mendalam pada aspek mendalam pada aspek tertentu.
3. Analisis Life Story (*human document*) : Dipergunakan untuk memperoleh bahan keterangan dari individu (informan) tertentu mengenai "apa yang dialaminya" di dalam masyarakat yang menjadi obyek penelitian.
4. Dokumentasi : Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka yang ada.
5. Perekaman (*Recording*) : Dilakukan terhadap sebagian besar responden dan informan kunci. Caranya adalah dengan merekam berbagai data atau informasi terkait dengan menggunakan alat perekam (radio tape, kamera, dan video kamera).

Untuk melakukan Analisis Data, digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. *Validasi Data*: Pada penelitian ini akan digunakan Triangulasi (*Triangulation*). Dalam hal ini penelitian dapat menggunakan berbagai sumber data, teori, metode dan investigator agar informasi yang disajikan konsisten. Oleh karena itu, untuk memahami dan mencari jawaban atas pertanyaan penelitian, peneliti dapat menggunakan lebih dari satu teori, lebih dari satu metode (wawancara, observasi dan analisis dokumen). Di samping itu, peneliti dalam melakukan wawancara dari bawahan sampai atasan dan menginterpretasikan temuan dengan pihak lain.
- b. *Analisis Data*: metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah modifikasi teknik analisis fenomenologi dari Van Kaam (Moustakas, 1994) : (1) *Listing and Preliminary Grouping* : Mendaftar semua ekspresi yang relevan dengan pengalaman yaitu daftar jawaban partisipan atau responden penelitian (*horizontalization*); (2) *Reduction and Elimination* : Menguji setiap ekspresi yang ada dengan dua persyaratan berikut : (a) Apakah ekspresi tersebut mengandung momen pengalaman yang penting dan mengandung unsur pokok yang cukup baik untuk memahami fenomena ? (b) Apakah ekspresi tersebut memungkinkan untuk dikelompokkan dalam suatu kelompok besar dan diberi label ? (3) *Clustering and Thematizing the Invariant Constituents (Thematic portrayal)*: Mengelompokkan data berdasarkan tema, yaitu mengelompokkan pengalaman responden penelitian yang berkaitan kedalam label-label tematik. (4) *Final Identification of the Invariant Constituents and Themes by Application*: mengidentifikasi data dengan cara mengecek ulang kelengkapan transkrip wawancara dan catatan lapangan mengenai ekspresi aktor. (5) *Individual Textural Description*:

Menggunakan data yang benar-benar valid dan relevan. Dengan menggunakan *invariant constituent* dan tema yang valid dan relevan dari tahap sebelumnya, dapat disusun *Individual Textural Description* dari pengalaman setiap responden penelitian. (6) *Individual Structural Description* : Menyusun variasi imajinatif masing-masing *co-researcher*. Hasil dari penyusunan *Individual Textural Description* dan *Imaginative Variation* akan membangun *Individual Structural Description* dari pengalaman setiap responden penelitian; (7) *Textural-Structural Description*: Tahap ini merupakan proses penggabungan antara *Textural Description* dan *Structural Description* dari pengalaman masing-masing setiap responden penelitian. Setelah *Individual Textural - Structural Description* tersusun maka dibuat suatu *Composite Description* dari makna dan esensi pengalaman sehingga menampilkan gambaran pengalaman kelompok secara satu kesatuan.

## HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapang, studi pustaka serta informasi dari berbagai pihak, maka dapat dikemukakan beberapa hal, antara lain:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengimplementasikan Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui kebijakan-kebijakan sebagaimana dituangkan dalam program-program/kegiatan klaster pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dengan Pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Adapun Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
  - a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat  
Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui Pengurangan beban & Peningkatan kualitas hidup wong cilik serta Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Desa. Program ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :
    - a) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai
    - b) Pemberdayaan Potensi Desa/Kelurahan
    - c) Program Pengembangan Sumberdaya Lokal Berbasis Kawasan
    - d) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan SDA dan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan
    - e) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Mata Air (SMA)
    - f) Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional

- g) Pemanfaatan dan Penerapan TTG dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi
  - h) Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)
- b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan  
Bertujuan untuk Pengembangan usaha, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Program ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:
- a) Pengembangan BUMDes
  - b) Pemberdayaan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu)
  - c) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)
  - d) Pengembangan Ekonomi Kawasan dan Pengembangan Pasar Desa
  - e) Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
  - f) Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi serta Pendataan Jalan Lain menuju Kesejahteraan Rakyat (JALIN KESRA)
- c. Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa  
Program ini bertujuan untuk penguatan tata kelola kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan mewujudkan transparansi, akuntabilitas serta kemandirian masyarakat. Program ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :
- a) Pengembangan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD)
  - b) Pengembangan Keswadayaan Masyarakat Desa/Kel (*Community Capacity Building*)
  - c) Lomba Desa/Kel. Dan Pemberdayaan Masyarakat Berhasil
  - d) Pengembangan Wabsite dan Implementasi serta Pendampingan Sistim Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP)
  - e) Model Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Cacat di Jawa Timur
  - f) Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mendukung kegiatan posyandu, PMT-AS dan PSN Demam berdarah
  - g) Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
  - h) Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren
  - i) Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
- d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa  
Program ini bertujuan untuk penguatan tata kelola kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan mewujudkan transparansi, akuntabilitas serta kemandirian masyarakat. Program ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :
- a) Sistem Informasi Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan;

- b) Pemberdayaan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM);
  - c) Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Kawasan Perdesaan;
  - d) Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan;
  - e) Pendidikan Kemasyarakatan dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Masyarakat Kualitas Masyarakat Desa/Kelurahan.
2. Di dalam implementasi program pemberdayaan, maka untuk efektivitasnya telah ditetapkan beberapa program kegiatan unggulan, antara lain: (a) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan SDA; (b) Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan; (c) Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan; (d) Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; (e) Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan; (f) Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin.
3. Menurut sudut pandang masyarakat, hal-hal di bawah ini berdasarkan penelitian dilapangan yang merupakan hambatan terhadap pengembangan atau pelaksanaan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan Masyarakat:
- a. Kurangnya pemahaman atau komitmen yang sungguh-sungguh
  - b. Hambatan perilaku
  - c. Hambatan Kebijakan Keuangan
  - d. Jangka waktu yang dibutuhkan bagi perubahan di tingkat yang lebih tinggi
  - e. Diversifikasi budaya, ekonomi, geografis, suku bangsa
  - f. Struktur, Fungsi dan Perilaku Pelayanan Umum
  - g. Kurangnya Data Monitoring dan Evaluasi yang bermutu
  - h. Indikator yang tidak tepat
  - i. Sistem administrasi yang terlalu birokratis
  - j. Kurangnya koordinasi program/proyek pada tingkat internal atau antar sector.
4. Berdasarkan pengamatan tim dilapang, dan diskusi terarah, maka tim dapat menyimpulkan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam upaya pemberdayaan masyarakat oleh lembaga-lembaga formal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat :
- a. Rendahnya sumber daya manusia (SDM);
  - b. Program hibah;
  - c. Kelembagaan;
  - d. Lemahnya pendampingan;
  - e. Peran tengkulak dan rentenir;
  - f. Pinjaman kurang mencukupi kebutuhan;
  - g. Terbatasnya jangka waktu dan keberlanjutan;

## PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis dan pengamatan di lapangan, maka dapat direkomendasikan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang paling tepat untuk dilaksanakan adalah dengan melalui program kemitraan. Kemitraan Usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (Perusahaan Mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. Kemitraan usaha akan menghasilkan efisiensi dan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra dan karenanya menguntungkan semua pihak yang bermitra. Kemitraan juga memperkuat mekanisme pasar dan persaingan usaha yang efisien dan produktif. Bagi usaha kecil kemitraan jelas menguntungkan karena dapat turut mengambil manfaat dari pasar, modal, teknologi, manajemen, dan kewirausahaan yang dikuasai oleh usaha besar. Usaha besar juga dapat mengambil keuntungan dari keluwesan dan kelincahan usaha kecil. Kemitraan hanya dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan jika kemitraan dijalankan dalam kerangka berfikir pembangunan ekonomi, dan bukan semata-mata konsep sosial yang dilandasi motif belas kasihan atau kedermawanan.

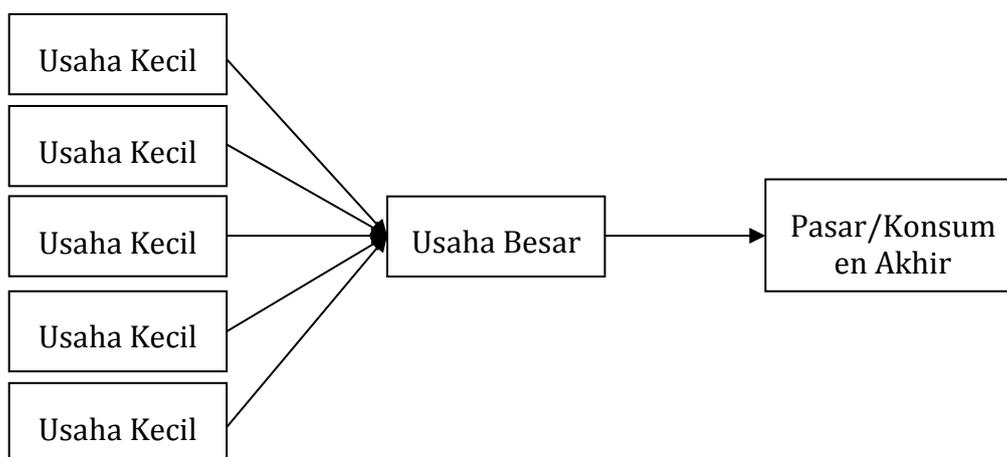
Banyak program pemerintah dan pola-pola kemitraan yang dibuat demi usaha kecil. Hal ini bertujuan untuk mendorong dan menumbuhkan usaha kecil tangguh dan modern. Usaha kecil sebagai kekuatan ekonomi rakyat dan berakar pada masyarakat dan usaha kecil yang mampu memperkokoh struktur perekonomian nasional yang lebih efisien. Pola-pola kemitraan tersebut antara lain: (a) Kerjasama keterkaitan antar hulu-hilir (forward linkage); (b) Kerjasama keterkaitan antar hilir-hulu (backward linkage); (c) Kerjasama dalam Pemilik Usaha; (d) Kerjasama dalam bentuk bapak dan anak-angkat; (e) Kerjasama dalam bentuk bapak angkat sebagai pemodal ventura; (f) Pola inti plasma; (g) Subkontrak; (h) Pola dagang umum; dan (i) Waralaba.

Berdasarkan analisis dan pengamatan di lapangan, maka dapat direkomendasikan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang paling tepat untuk dilaksanakan adalah dengan melalui program kemitraan. Kemitraan Usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (Perusahaan Mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. Kemitraan usaha akan menghasilkan efisiensi dan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra dan karenanya menguntungkan semua pihak yang bermitra. Kemitraan juga memperkuat mekanisme pasar dan persaingan usaha yang efisien dan produktif. Bagi usaha kecil kemitraan jelas menguntungkan karena dapat turut mengambil manfaat dari pasar, modal, teknologi, manajemen, dan kewirausahaan yang dikuasai oleh usaha besar. Usaha besar juga dapat mengambil keuntungan dari keluwesan dan kelincahan usaha kecil. Kemitraan hanya dapat

berlangsung secara efektif dan berkesinambungan jika kemitraan dijalankan dalam kerangka berfikir pembangunan ekonomi, dan bukan semata-mata konsep sosial yang dilandasi motif belas kasihan atau kedermawanan.

Kemitraan dilihat dari sudut pandang sistem paling tidak, ada 3 tipe yang cocok untuk diterapkan dalam Program Pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jawa Timur, yaitu:

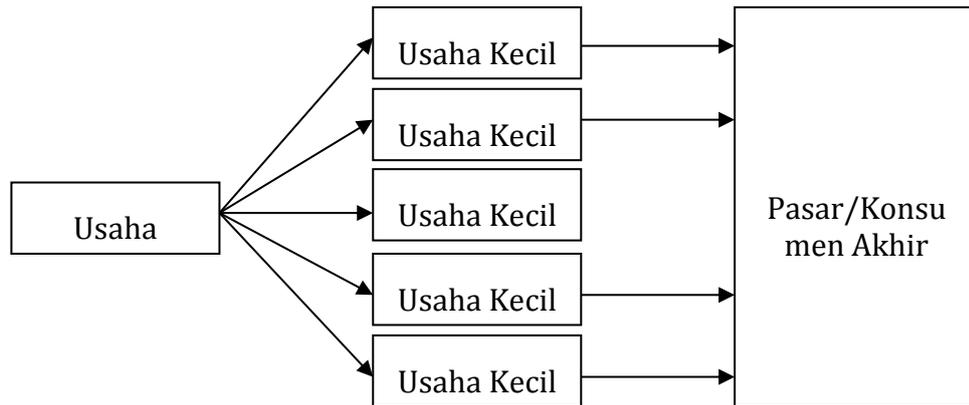
1. Vertical Backward Linkage: Adalah sitem kemitraan yang di dalamnya Usaha Besar (UB) bergerak dalam produksi barang akhir (*assembler*) Usaha Kecil (UK) sebagai pemasok komponen kepada UB. Pola ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Pola kemitraan vertical backward linkage**

Pola ini diterapkan untuk usaha kecil yang sulit untuk mendapatkan pasar yang stabil. Bagi pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan pasar, maka pola ini sangat cocok digunakan sebagai media pemberdayaan usaha kecil. Model kemitraan seperti ini misalnya pada usaha konveksi, dimana unit konveksi besar akan menampung hasil produksi usaha kecil untuk dipasarkan. Produk usaha kecil mengikuti pesanan usaha besar. Dengan model ini, maka kepastian pasar bagi usaha kecil akan terjamin. Pada usaha pembuatan krupuk, usaha kecil perajin pembuat krupuk, akan memasok kepada pedagang besar, yang selanjutnya pedagang besar akan memproses lebih lanjut dan memasarkan ke konsumen.

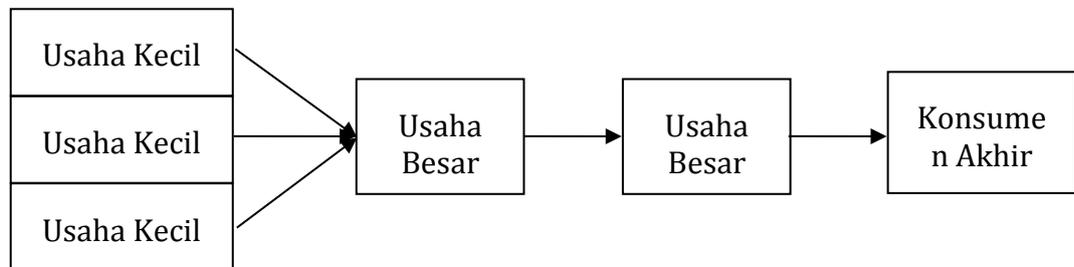
2. Vertical Forward Linkage: Usaha Centernya/Besar menghasilkan bahan baku dan memasok untuk diproses selanjutnya oleh Usaha Kecil. Pola ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. Pola kemitraan vertical forward linkage**

Pada model ini, usaha besar akan memberikan bimbingan teknis dan pasokan bahan baku secara rutin, sementara usaha kecil adalah unit usaha yang akan memproses lebih lanjut dan menjual ke konsumen akhir. Contoh pada pola ini adalah pada usaha kecil Mie Ayam, Roti, Kue, dan sejenisnya, yang bermitra dengan usaha terbesar penghasil tepung terigu.

- Horizontal Linkage: Usaha Besar sebagai trader/exporter, Usaha Kecil menghasilkan produk yang akan dipasok ke trader. Pada model ini, usaha besar hanya menjadi pengepul yang akan menyalurkan lagi kepada pedagang/usaha lain baik domestik maupun asing. Pola ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3. Pola kemitraan horizontal forward linkage**

### KESIMPULAN

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengimplementasikan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Adapun Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: (a)

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat; (b) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; (c) Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa; dan (d) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;

Di dalam implementasi program pemberdayaan, maka untuk efektivitasnya telah ditetapkan beberapa program kegiatan unggulan, antara lain: (a) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan SDA; (b) Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan; (c) Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan; (d) Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; (e) Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan; (f) Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin.

Beberapa hambatan terhadap pengembangan atau pelaksanaan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan Masyarakat: (a) Kurangnya pemahaman atau komitmen yang sungguh-sungguh, (b) Hambatan perilaku, (c) Hambatan Kebijakan Keuangan, (d) Jangka waktu yang dibutuhkan bagi perubahan di tingkat yang lebih tinggi, (d) Diversifikasi budaya, ekonomi, geografis, suku bangsa, (e) Struktur, Fungsi dan Perilaku Pelayanan Umum, (f) Kurangnya Data Monitoring dan Evaluasi yang bermutu, (g) Indikator yang tidak tepat, (h) Sistem administrasi yang terlalu birokratis, (i) Kurangnya koordinasi program/proyek pada tingkat internal atau antar sector; (j) Rendahnya sumber daya manusia (SDM); (k) Program hibah; (l) Kelembagaan; (m) Lemahnya pendampingan; (n) Peran tengkulak dan rentenir; (o) Pinjaman kurang mencukupi kebutuhan; dan (p) Terbatasnya jangka waktu dan keberlanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Suraji, 29 Januari 2010, "(Me-mandiri-kan) Anak Bangsa", Harian Kompas Ciputra, 2008, "Ciputra Quantum Leap Entrepreneurship mengubah masa depan bangsa dan masa depan anda", Jakarta : Penerbit Alex Media Komputindo Dinsi Valentino, 2005, "Jangan Mau Seumur Hidup Jadi Orang Gajian", Jakart : Penerbit Lets Go Indonesia
- Barndt, Steven C. (1985). Sepuluh Perintah Bagi Pengusaha. Jakarta: PPM
- Drucker, Peter F. (1985). Inovasi dan Kewirausahaan, Praktek dan Dasar-dasar. (Terjemahan Rusjdi Naib). Surabaya: Erlangga
- Glendoh, H.S. 2001. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol. 3 No. 2 Maret: 1-13. Universitas Kristen Petra. Surabaya.
- Haeruman, H. (2000). "Peningkatan Daya Saing UKM untuk Mendukung Program PEL". Makalah Seminar Peningkatan Daya Saing, Graha Sucofindo. Jakarta
- Hubeis, M. (1997). "Manajemen UKM Profesional di Era Globalisasi Melalui Pemberdayaan Manajemen Industri". Orasi Ilmiah. Institut Pertanian Bogor
- Kasali Rhenald, 2010, "Wirausaha Muda Mandiri", Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

- Maskur, F.M., Tantangan Koperasi Mengikis Kemiskinan, Laporan Khusus Koperasi & UKM. Bisnis Indonesia. Kamis, 12 Juli 2007.
- Meredith, Geoffrey et al, 2002, "Kewirausahaan : Teori dan Praktek" Jakarta : Penerbit PPM
- Muhandri, T. (2002). "Karakteristik Produk Pangan yang Sesuai untuk UKM". Tesis. Magister Program Studi Teknik dan Manajemen Industri. Institut Teknologi Bandung
- Muhandri, T. (2002). Strategi Penciptaan Wirausaha (Pengusaha) Kecil Menengah Yang Tangguh. Bogor : Falsafah Sain IPB
- Nurweni, H. 2004. Industri Kecil dan Menengah: Perijinan dan Sertifikasi. Telaah Bisnis. Vol. 5 No. 1 Juli: 19- 30. AMP YKPN. Yogyakarta.
- Pardede, F.R. (2000). "Analisis Kebijakan Pengembangan UKM di Indonesia". Tesis. Magister Program Studi Teknik dan Manajemen Industri. Institut Teknologi Bandung
- Prawirokusumo, S. 1997. Peranan Perguruan Tinggi dalam Menciptakan Wirausaha-Wirausaha Tangguh. Makalah Seminar. PIBIKOPIN dan FNSt. Jatinangor.
- Rodyat, Y. 1997. Pengembangan Mutu Usaha Kecil Melalui Sistem Modal Ventura. Manajemen Usahawan Indonesia, No. 04 Th. XXVI April: 5-9. Lembaga Management FE UI. Jakarta.
- Singgih, N. 2001. Kajian Pembinaan Industri Kecil dalam Memperkuat Struktur Perekonomian Indonesia. Jurnal Ekonomi. No. 6 Th. 5 Juni: 77-82. Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka. Malang.
- Sulamsi. (1989). "Karakteristik 22 Pengusaha Wanita di Bandung". Tesis. Magister Program Studi Teknik dan Manajemen Industri. Institut Teknologi Bandung
- Syafii Antonio, Muhammad, 2001, "Bank Syariah dari teori ke praktik", Jakarta : Gema Insani
- Tambunan, T. 2002. Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. Edisi Pertama. PT. Salemba Empat Patria. Jakarta.
- <http://www.bkksi.or.id/modules> (akses 12 Maret 2008) tentang BKSSI- Pola Pembinaan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi dalam Rangka Otonomi Daerah.
- <http://www.dekop.go.id/index>. (akses 31 Juli 2005) tentang Peran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Nasional.
- <http://www.menlh.go.id/usahakecil/top/kriteria.htm>. (akses 20 Januari 2005) Kementerian Lingkungan Hidup. 2004. Batasan/Kriteria Usaha Kecil dan Menengah Menurut Beberapa Organisasi.